

## Solidaritas sosial dalam gerakan kebaikan warga negara

Iqbal Arpanudin<sup>1</sup>, Syifa Siti Aulia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi PPKn, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel: Diterima: 10 Mei 2022 Disetujui: 1 Juli 2022</p> <p><b>Kata kunci:</b> Gerakan kebaikan Gotong royong Modal sosial warga negara</p> <p><b>Keywords :</b> <i>The movement of kindness</i> <i>Mutual aid</i> <i>Social capital of citizen</i></p>	<p>Budaya tolong menolong dan kedermawanan warga negara Indonesia tumbuh subur di tengah pandemi. Budaya tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kajian kewarganegaraan sebagai rasa dan praktik. Tolong menolong dan kedermawanan yang melembaga merupakan bagian dari gerakan kebaikan warga negara yang berada pada domain sosiokultural pada kajian kewarganegaraan. Di tengah pandemi Covid-19 ini, beragam elemen bangsa turun tangan bahu membahu untuk berusaha membantu krisis yang melanda. Banyak aksi kedermawanan sosial telah dilakukan berbagai kalangan saat ini, baik perorangan, yayasan, kelompok, ataupun perusahaan. Artikel ini mengulas mengenai modal sosial bangsa Indonesia mengakar kuat dalam tradisi keseharian masyarakat Indonesia. Akar sosio-kultural bangsa Indonesia inilah yang menjadikan gerakan kebaikan tumbuh, berkembang, dan menyebar di saat pandemi. Gerakan kebaikan berhubungan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang dalam masyarakat.</p> <p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>The culture of helping and generosity of Indonesian citizens thrives amid a pandemic. The culture becomes an integral part of the study of citizenship as a taste and practice. Help and institutionalized generosity is part of a citizen kindness movement that is in the sociocultural domain of civic studies. During the Covid-19 pandemic, various elements of the nation stepped in hand to try to help the crisis that hit. Many acts of social generosity have been carried out by various groups today, whether individuals, foundations, groups, or companies. This article reviews the social capital of the Indonesian nation deeply rooted in the daily traditions of the Indonesian people. The socio-cultural roots of the Indonesian nation are what make the kindness movement grow, develop, and spread during the pandemic. The kindness movement is closely related to the sense of care, solidarity, and social relations between people in society</i></p>

### Pendahuluan

Kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari hubungan satu sama lain. Tidak diragukan lagi bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri karena keterbatasan manusia itu sendiri. Individu menciptakan kondisi ideal dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang serta untuk melindungi kepentingan individu itu sendiri dengan membentuk masyarakat sipil.

Memahami masyarakat sipil dicirikan oleh berbagai teori dan pendekatan yang ditentukan sebelumnya oleh proses sosial, politik, ekonomi dan budaya saat ini (Naletova et al., 2016). Selanjutnya Barber (1995) percaya bahwa salah satu ciri masyarakat sipil yang paling signifikan diwujudkan dalam prinsip kebebasan yang merupakan atribut dari sektor swasta dan prinsip penghargaan terhadap kesejahteraan bersama

Keterlibatan warga negara berhubungan dengan partisipasi politik dalam pengertian yang umum, namun juga hubungan ini diperluas dengan hubungan warga negara di masyarakat (Putnam, 1995b). Alasannya karena dalam kehidupan sosial, seorang warga negara akan terkait dengan banyak hal dalam kesehariannya, maka perlu adanya pengetahuan dan sikap untuk mengembangkan norma-norma sosial dan kepercayaan yang membawa efek menguntungkan pada segala aspek (Putnam, 1995a, 2001). Keterlibatan warga negara (*civic engagement*) telah diukur dalam sejumlah cara termasuk perilaku warga negara, sikap terhadap pejabat terpilih (hasil pemilihan umum), partisipasi dalam

percakapan politik, konsumsi dan persepsi media, niat untuk terlibat dalam tindakan sipil, dan pengetahuan sipil (Flanagan et al., 2007). Konseptualisasi yang bervariasi dari keterlibatan sipil ini digunakan untuk mengeksplorasi dua pandangan yang sangat berbeda dari keterlibatan sipil remaja dalam kaitannya dengan media digital karena perspektif optimis dan pesimistis tentang peran media digital dalam mendukung kapasitas kaum muda untuk mengatur diri sendiri (Bennett, 2008).

Dalam konteks manusia dan kemanusiaan, pengenalan jati diri manusia dan kemanusiaan dengan realitas kehidupan di dalam masyarakat membutuhkan fondasi ilmu. Sejarah manusia menegaskan bahwa manusia memiliki entitas yang berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia memiliki kecenderungan untuk keluar dari titik keseimbangan garis susu menuju garis alkohol (Soewardi, 2001). Kecenderungan lain yang ada pada manusia sebagaimana disampaikan Thomas Hobbes beberapa abad lalu adalah "*homo homini lupus*", artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan Tuhan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri.

Sementara itu kemanusiaan merupakan kondisi yang memberi orang kemungkinan untuk mengembangkan kemampuan manusia untuk menjadi orang yang reflektif dan dialogis, mendapatkan sumber untuk menjalani kehidupan yang baik, hidup bersama yang diperintah oleh nilai-nilai moral, membantu orang lain menjalani kehidupan yang baik juga (Veugelers, 2011). Immanuel Kant sebagaimana dikatakan Porty dan Schmidt (Porty & Schmidt, 2009) yakni kemanusiaan sebagai "aturan ideal". Kemanusiaan sebagai sebuah gagasan abstrak yang berada di luar batas pengalaman menegaskan setiap manusia diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan bukan hanya sarana (Ophir, 2005). Kant juga merumuskan tesis ketiga yakni alam telah berkehendak bahwa manusia harus, dengan sendirinya, menghasilkan segala sesuatu yang melampaui sifat kebinatangannya (Porty & Schmidt, 2009).

Partisipasi dalam gerakan solidaritas di tengah krisis Yunani misalnya, berkontribusi pada pembentukan kesadaran sosial yang lebih dinamis yang memberikan pesan positif yang kuat yang layak untuk disebarluaskan (Theodossopoulos, 2016). Solidaritas kemanusiaan lebih bernilai dalam perannya sebagai sarana perluasan kesadaran politik dari mereka yang berpartisipasi di dalamnya, daripada sebagai mekanisme untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun bantuan kemanusiaan terbatas, hanya solusi sementara dan tidak mencukupi, namun tindakan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan melahirkan pembentukan jaringan aktif warga yang mencari perubahan (Theodossopoulos, 2016).

Namun menurutnya, meskipun ada dimensi pemberdayaan dari inisiatif solidaritas diuraikan sebelumnya, efektivitas beberapa solidaritas gerakan dalam mengatasi beberapa dampak langsung dari penghematan di Yunani di tingkat lokal dapat berkontribusi untuk mengalihkan perhatian dari ketidakselarasan sistemis. Merujuk pendapat Agamben (1998, p. 133) "agen kemanusiaan dapat dilihat memelihara 'solidaritas rahasia dengan' kekuatan yang harus dilawan". Hal ini kelemahan kegiatan kemanusiaan sebagai konsekuensi yang tidak diharapkan yakni memolitisasi penderitaan (Ticktin, 2014). Politisasi ini seperti tindakan kemanusiaan melawan kelaparan dapat menyebabkan politisasi kelaparan sebagai pengalaman yang tertanam dalam sejarah (Theodossopoulos, 2016), bantuan kemanusiaan dalam menanggapi keadaan darurat terkait konflik dapat menetralkan kekerasan dan perang (Fassin & Pandolfi, 2010; Theodossopoulos, 2016)

Kemanusiaan berasumsi bahwa orang hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani dan harus memanfaatkannya sebaik mungkin dalam hal karya kreatif dan kebahagiaan; bahwa kebahagiaan manusia adalah pembenarannya sendiri dan tidak memerlukan dukungan sumber supernatural; dan bahwa manusia, dengan menggunakan kecerdasan mereka sendiri dan bekerja sama secara bebas satu sama lain, dapat membangun benteng kedamaian dan keindahan yang abadi di atas bumi ini (Lamont, 1997). Asumsi Lamont yang mengesampingkan dukungan supernatural (*keberadaan dan kuasa Tuhan, pen.*) yang bertolak belakang dengan fitrah manusia sebagai ciptaan Tuhan yang menegaskan bahwa manusia dibekali kekuatan dan pengetahuan untuk mengenal serta sesuatu yang berada di luar dan di dalam dirinya inilah yang menjadi kriteria esensial yang membedakan manusia dengan segenap makhluk Tuhan lainnya.

Kemanusiaan menjadi konsep universal yang melintasi batas wilayah negara, namun di sisi lain tampil secara partikular. Umat manusia secara bersamaan melintasi dan memelihara kesamaan dan perbedaan termasuk hak atas perbedaan budaya, penentuan nasib sendiri, pemerintahan sendiri, agama, dan kebangsaan. Kemanusiaan dengan demikian sesuai dengan perwujudan bersama tetapi berbeda dengan tanggung jawab bersama (Burke, 2011).

## Solidaritas Sosial warga negara

Solidaritas sosial biasanya dipahami sebagai kondisi masyarakat yang bercirikan persatuan dalam hal nilai, gagasan, keyakinan, pandangan, kepentingan, norma, dan saling ketergantungan fungsional dan kesepakatan bersama tentang tindakan yang ditujukan untuk pelaksanaan kepentingan masyarakat ini. Tidak diragukan lagi, solidaritas sosial merupakan komponen penting dari masyarakat sipil modern yang menjadi prasyarat untuk berfungsinya lembaga-lembaga di dalam masyarakat modern. Dengan demikian, lembaga swadaya masyarakat tidak dapat dibayangkan tanpa solidaritas sosial yang menjadi landasan bagi interaksi yang efektif dan saling menguntungkan antar individu dalam kerangka perkumpulan tersebut. Dalam konteks gerakan kebaikan di masa pandemi saat ini, gerakan kebaikan berusaha untuk membantu menyediakan kebutuhan publik yang terkadang tidak pernah diharapkan dari sektor pemerintah melalui beragam lembaga di luar pemerintah (Bin-Nashwan et al., 2020). Penyediaan kebutuhan di masa pandemi ini tercipta berkat adanya solidaritas sosial di antara masyarakat dalam hal saling membantu (Muqstith et al., 2021).

Modal sosial merupakan sumber daya yang berasal dari hubungan sosial yang memungkinkan beragam subjek sebagai individu dan organisasi kelompok untuk mengoordinasikan tindakan untuk mendapatkan manfaat dan mencapai hasil yang diinginkan (Payne et al., 2011; Suseno, 2018). Modal sosial menjadi ikatan bagi individu maupun kelompok dalam jaringannya untuk memberikan akses dan peluang lebih luas karena relasi dan posisinya dalam struktur sosial (Burt & Burzynska, 2017).

Modal sosial juga berkembang karena ada kontribusi dari posisi agama dalam konteks sosial politik. Sebagaimana keberhasilan proses penguatan masyarakat sipil yang dipengaruhi oleh sikap negara, modal sosial berbasis agama pun cukup erat kaitannya dengan negara karena seringkali modal sosial berbasis agama menjadi kuat namun situasi politik yang lain bisa melemah' (Latief, 2013b). Hal ini bisa dilihat dari hasil observasi Candland (2000) di Pakistan, Thailand, Sri Lanka, dan Indonesia yang memiliki konfigurasi keagamaan penduduk relatif sama namun berbeda dalam memosisikan agama dan negara. Menurutnya di Pakistan dan Indonesia mayoritas penduduknya muslim, namun Islam menjadi agama negara di Pakistan, tetapi di Indonesia tidak demikian. Sementara itu, di Thailand dan Sri Lanka mayoritas penduduknya menganut Budhisme, tetapi Budhisme dijadikan agama negara di Thailand, dan tidak seperti itu di Sri Lanka (Candland, 2000; Latief, 2013b).

Modal sosial masyarakat Indonesia adalah kegotong-royongan yang mengakar secara sosio-kultural sejak berabad lamanya. Akar sosio-kultural bangsa Indonesia inilah yang menjadikan gerakan kebaikan tumbuh, berkembang, dan menyebar di saat pandemi. Gerakan kebaikan berhubungan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang dalam masyarakat (Latief, 2013a). Dalam perkembangannya, konsep gerakan kebaikan dimaknai secara lebih luas yakni tidak hanya berhubungan dengan kegiatan berderma itu sendiri melainkan pada bagaimana keefektifan sebuah kegiatan "memberi", baik material maupun non-material, dapat mendorong perubahan kolektif di masyarakat (Latief, 2013a).

Warga negara yang baik setidaknya tercermin dari tiga aspek utama. Ketiga aspek itu meliputi: (1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (2) kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*); dan (3) watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Pengetahuan kewarganegaraan antara lain berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Kecakapan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat berupa kecakapan intelektual dan partisipatoris. Watak kewarganegaraan merupakan sifat-sifat publik dan privat utama yang dimiliki warga negara untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

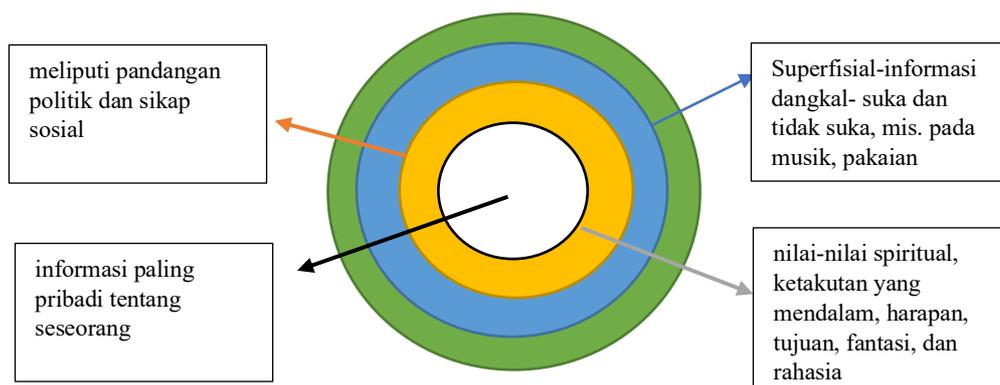
Kewarganegaraan sosial (*social citizenship*) yang dikemukakan Marshall dikaitkan dengan kesetaraan status dan redistribusi horizontal lebih dari redistribusi vertikal (Marshall, 1970). Penyediaan dan akses kesehatan, pendidikan, perumahan sebagai kewarganegaraan sosial yang memungkinkan anggota komunitas politik untuk menjadi warga negara yang sehat dan berpendidikan yang dapat menerapkan kewarganegaraan politik dan sipil mereka dengan cara yang berarti (Marshall, 1970; Netz et al., 2019).

## Hubungan antara Penetrasi Sosial, Modal Sosial, dan Masyarakat Sipil dalam Perspektif Sosiokultural

Teori penetrasi sosial dikembangkan untuk menjelaskan fungsi hubungan interpersonal yang dibangun (Carpenter & Greene, 2016a). Teori ini juga menjelaskan bahwa penetrasi sosial meningkatkan ikatan hubungan ke arah lebih intim karena ada *turning point* yang dikehendaki bersama. Penetrasi sosial merupakan proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari pola yang superfisial menjadi lebih intim (Altman & Taylor, 1973a). Teori ini berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim maupun sebaliknya.

Teori penetrasi sosial menunjukkan bahwa orang akan mengungkap self-disclosure (pengungkapan diri) lebih dekat ke inti pusat ketika mereka menemukan orang lain dengan ciri kepribadian yang cocok. Penerimaan orang lain terjadi seiring waktu, karena individu secara bertahap mengungkapkan aspek dirinya satu sama lain. Pengungkapan diri mengacu pada informasi bahwa individu secara sukarela dan sengaja mengungkapkan tentang diri mereka kepada orang lain, termasuk pikiran, perasaan, dan pengalamannya (Carpenter & Greene, 2016b). Teori penetrasi sosial menjelaskan beberapa lapisan termasuk lapisan superfisial, lapisan tengah, lapisan dalam, dan kepribadian inti (Altman & Taylor, 1973b; Carpenter & Greene, 2016b).

Lapisan superfisial terdiri dari informasi yang cukup dangkal seperti suka dan tidak suka pada pakaian dan musik. Lapisan tengah meliputi pandangan politik dan sikap sosial. Lapisan dalam meliputi nilai-nilai spiritual, ketakutan yang mendalam, harapan, tujuan, fantasi, dan rahasia. Kepribadian inti mencakup informasi paling pribadi tentang seseorang. Teori ini biasanya dijelaskan menggunakan metafora bawang untuk menyarankan tingkat, atau lapisan dalam pengungkapan diri seperti gambar di bawah ini.



Gambar Metafora Bawang dalam Hubungan

Sumber: (Baack, 1991; Baack et al., 2000)

Pola hubungan di dalam teori penetrasi sosial dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan kebaikan dalam konteks relasi sosial antar warga negara, motif pemberi bantuan, dan *self-disclosure* pendonor. Ikatan antar warga negara merupakan modal bagaimana kegiatan kesukarelaan dapat berkembang menjadi gerakan kebaikan. Pada level di atas superfisial, individu memiliki nilai sosial dan spiritual yang salah satunya adalah altruis. Altruis bisa disebut sebagai gerakan tanpa bayaran yang didorong oleh motivasi altruis untuk meningkatkan persahabatan, relasi, dan karakter yang baik (Kurzban et al., 2015; Piliavin & Charng, 1990; Seglow, 2002). Gerakan tanpa bayaran untuk memberikan sesuatu kepada orang lain ini berlainan dengan *theory of gift* disebut sebagai transfer murah hati dari objek yang bernilai sosial dengan jaminan timbal balik asinkron (ada interval waktu antara memberi dan membalas) dan dalam bentuk barang (Heins et al., 2018; Mauss, 2002).

Sementara itu perspektif sosiokultural dicetuskan pertama kali oleh seorang psikolog Rusia yang bernama Lev Vygotsky (1896-1934). Teori ini menekankan bagaimana seorang anak akan tumbuh menjadi dewasa dan datang untuk mengembangkan pikiran, perilaku dan keyakinan (Veer, 2007; Vygotsky, 1997). Teori sosiokultural adalah teori yang muncul dalam psikologi yang melihat kontribusi penting yang dibuat masyarakat untuk perkembangan individu (Cherry, 2019). Teori ini menekankan interaksi antara orang-orang yang sedang berkembang dan budaya di mana mereka tinggal. Teori sosiokultural juga menunjukkan bahwa pembelajaran manusia sebagian besar merupakan proses sosial. Dari perspektif kritis, sosiokultural, identitas dilihat sebagai konstruksi dan

berlaku dalam konteks sosial (Hines et al., 2016). Identitas tidak statis atau inheren, tetapi dinamis dan berubah-ubah sesuai keadaan

Para ahli teori dalam perspektif sosiokultural menekankan keadaan di sekitar individu dan bagaimana perilaku mereka dipengaruhi secara khusus oleh orang lain, institusi sosial, dan kekuatan sosial (Abnormal Psychology, n.d.). Menurut Sanderson (2010, p. 19) bahwa:

*“a perspective describing people’s behavior and mental processes as shaped in part by their social and/or cultural contact, including race, gender, and nationality”*/perspektif sosiokultural merupakan perspektif yang menggambarkan perilaku orang dan proses mental yang sebagian dibentuk oleh kontak sosial dan/atau budaya mereka, termasuk ras, gender, dan kebangsaan.

Perspektif sosiokultural berusaha memahami perilaku manusia dan pengembangan kepribadian dengan memeriksa aturan kelompok sosial dan sub kelompok di mana individu menjadi anggotanya. Aturan-aturan ini sering kali merupakan pedoman tidak tertulis yang mengarahkan tindakan seseorang. Dari perspektif tersebut melahirkan realitas sosial yang merupakan kenyataan yang dapat dilihat secara riil yang menyangkut kondisi kehidupan manusia di dalam suatu kelompok masyarakat (Setiadi & Kolip, 2011, p. 31). Untuk melihat realitas sosiokultural dapat dilakukan dengan melihat gejala sosial di lingkungan sekitarnya.

Perspektif maupun realitas sosiokultural warga negara berkaitan dengan teori penetrasi sosial dikembangkan untuk menjelaskan fungsi hubungan interpersonal yang dibangun (Carpenter & Greene, 2016b). Hubungan sosiokultural dapat dijelaskan oleh teori penetrasi sosial meningkatkan ikatan hubungan ke arah lebih intim karena ada *turning point* yang dikehendaki bersama untuk menciptakan relasi sosial yang lebih baik. Penetrasi sosial merupakan proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari pola yang superfisial menjadi lebih intim (Altman & Taylor, 1973b). Teori ini berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim maupun sebaliknya.

### **Relasi Modal Sosial dan Masyarakat Sipil**

Modal sosial merupakan sumber daya yang berasal dari hubungan sosial yang memungkinkan beragam subjek sebagai individu dan organisasi kelompok untuk mengoordinasikan tindakan untuk mendapatkan manfaat dan mencapai hasil yang diinginkan (Payne et al., 2011; Suseno, 2018). Modal sosial menjadi ikatan bagi individu maupun kelompok dalam jaringannya untuk memberikan akses dan peluang lebih luas karena relasi dan posisinya dalam struktur sosial (Burt & Burzynska, 2017).

Masyarakat madani dipahami sebagai antitesis dari masyarakat primitif. Selanjutnya dikatakan bahwa kenyataannya walaupun *civil society* menurut Azra (Fauzia, 2016) adalah suatu perkumpulan di luar negara modern namun tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri dan mempertahankan keberadaannya tanpa tatanan politik dan tunduk pada lebih banyak lembaga, yaitu pemerintah. Jika ada ketidakadilan dalam masyarakat, atau jika ada ancaman terhadap kebaikan bersama, maka wajar bagi negara untuk menentukan kriteria kebaikan bersama. Pandangan lain menyatakan bahwa masyarakat sipil hidup berdampingan dengan negara, yang disebutnya masyarakat politik. Menurutnya, negara akan terserap ke dalam masyarakat madani, sehingga kemudian terbentuk masyarakat yang teregulasi. (*regulated society*) (Armstrong, 2006).

Masyarakat sipil merupakan entitas penyeimbangan kekuatan negara yang tidak apriori subordinatif terhadap negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hegel, tetapi mempunyai sifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi yang mampu menjadi penyeimbang untuk menahan kecenderungan intervensi negara. Sampai saat ini pemahaman para intelektual tentang konsep *civil society* masih berbeda-beda, tergantung perspektif mana yang diikuti. Pendekatan Hegelian, lebih menekankan pentingnya kelas menengah dan pemberdayaannya, khususnya bagi sektor ekonomi dan bagi pembangunan *civil society* yang kuat. Pendekatan Gramscian diterapkan untuk menghadapi hegemoni ideologi negara. Sementara itu pendekatan Tocquevillian menekankan pada penguatan organisasi-organisasi independen dalam masyarakat dan pencangkakan *civic culture* untuk membangun jiwa demokrasi (Veldhuis, 1997).

Model Gramsci dan Tocqueville lebih banyak menjadi inspirasi gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada akhir tahun 1980-an daripada konsep Hegel yang dianggap terlalu pesimis dalam memaknai *civil society*. Pengalaman dari negara-negara tersebut membuktikan bahwa dominasi negara atas masyarakat justru akan melumpuhkan kehidupan sosialnya. Gerakan

membangun *civil society* menjadi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga negara. Gagasan *civil society* menjadi landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkeraman negara yang secara sistemis melemahkan daya kreasi dan kemandirian mereka (Hoskins & Deakin-Crick, 2010).

Relasi modal sosial dan masyarakat sipil saling berarisan. Modal sosial merujuk pada nilai normatif serta keyakinan dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat dan masyarakat sebagai wahana praktik kemasyarakatan itu (Hyden, 1997). Dengan kata lain, modal sosial adalah norma dan nilainya, sementara masyarakat sipil adalah media untuk menyemaikan dan menumbuhkan norma dan nilai tersebut (Latief, 2013b).

Gerakan kebaikan merupakan salah satu bentuk modal sosial yang mengikat masyarakat bersama dalam semangat mendukung kesejahteraan sesama (Putnam, 2001). Menurut teori Putnam, gerakan kebaikan agama menyediakan dua modal sosial: partisipasi agama dan gerakan kebaikan itu sendiri. Partisipasi agama adalah modal sosial yang mengikat, yang pada dasarnya berwawasan ke dalam dan eksklusif, tetapi juga penting untuk memperkuat masyarakat (Fauzia, 2017). Gerakan kebaikan menjembatani modal sosial yang melingkupi berbagai kelompok sosial dan merupakan faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Gerakan kebaikan berhubungan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang dalam masyarakat (Latief, 2013a). Dalam perkembangannya, konsep gerakan kebaikan dimaknai secara lebih luas yakni tidak hanya berhubungan dengan kegiatan berderma itu sendiri melainkan pada bagaimana keefektifan sebuah kegiatan “memberi”, baik material maupun non-material, dapat mendorong perubahan kolektif di masyarakat (Latief, 2013a).

## Simpulan

Modal sosial masyarakat Indonesia adalah kegotong-royongan yang mengakar secara sosio-kultural sejak berabad lamanya. Akar sosio-kultural bangsa Indonesia inilah yang menjadikan gerakan kebaikan tumbuh, berkembang, dan menyebar di saat pandemi. Pola hubungan di dalam teori penetrasi sosial dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan kebaikan dalam konteks relasi sosial antar warga negara, motif pemberi bantuan, dan *self-disclosure* pendonor. Ikatan antar warga negara merupakan modal bagaimana kegiatan kesukarelaan dapat berkembang menjadi gerakan kebaikan. Pada level di atas superfisial, individu memiliki nilai sosial dan spiritual yang salah satunya adalah altruis.

## Referensi

- Abnormal Psychology. (n.d.). *Sociocultural perspective*.
- Agamben, G. (1998). *Homo sacer: Sovereign power and bare life* (D. Heller-Roazen, Trans.). Stanford University Press.
- Altman, I., & Taylor, D. A. (1973a). *Social penetration: The development of interpersonal relationships*. Holt, Rinehart & Winston.
- Altman, I., & Taylor, D. A. (1973b). *Social penetration: The development of interpersonal relationships*. Holt, Rinehart & Winston.
- Armstrong, C. (2006). Global civil society and the question of global citizenship. *Journal Voluntas*, 17(4), 348–356. <https://doi.org/10.1007/s11266-006-9020-6>
- Baack, D. (1991). The personal impact of company policies: A social penetration theory perspective. *Journal of Managerial Issues*, 3(2), 196–219.
- Baack, D., Fogliasso, C., & Harris, J. (2000). The personal impact of ethical decisions: A social penetration theory. *Journal of Business Ethics*, 24(1), 39–49. <https://doi.org/10.1023/A:1006016113319>
- Barber, B. R. (1995). Searching for civil society. *National Civic Review*, 84(2), 114–118. <https://doi.org/10.1002/ncr.4100840205>
- Bennett, W. L. (2008). *Civic life online: Learning how digital media can engage youth* (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on digital media and learning). MIT Press.

- Bin-Nashwan, S. A., Al-Daihani, M., Abdul-Jabbar, H., & Al-Ttaffi, L. H. A. (2020). Social solidarity amid the COVID-19 outbreak: Fundraising campaigns and donors' attitudes. *International Journal of Sociology and Social Policy*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2020-0173>
- Burke, A. (2011). Humanity after biopolitics. *Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities*, 16(4), 101–114. <https://doi.org/10.1080/0969725X.2011.641348>
- Burt, R. S., & Burzynska, K. (2017). Chinese entrepreneurs, social networks, and guanxi. *Management and Organization Review*, 13(2), 1–37. <https://doi.org/10.1017/mor.2017.6>
- Candland, C. (2000). Faith as social capital: Religion and community development in Sothern Asia. *Political Sciences*, 33(3), 355–374. <https://doi.org/10.1023/A:1004857811117>
- Carpenter, A., & Greene, K. (2016a). Social penetration theory. In C. R. Berger & M. E. Roloff (Eds.), *The International Encyclopedia of Interpersonal Communication* (pp. 1–5). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118540190.wbeic0160>
- Carpenter, A., & Greene, K. (2016b). Social penetration theory. In C. R. Berger & M. E. Roloff (Eds.), *The International Encyclopedia of Interpersonal Communication* (pp. 1–5). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118540190.wbeic0160>
- Cherry, K. (2019). Sociocultural theory of cognitive development. *Verywellmind*. November, 16.
- Fassin, D., & Pandolfi, M. (Eds.). (2010). *Contemporary states of emergency. The politics of military and humanitarian interventions*. Zone Books.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*. Gading.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223–236. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>
- Flanagan, C., Levine, P., & Settersten, R. (2007). *Civic engagement and the transition to adulthood*. CIRCLE.
- Heins, V. M., Unrau, C., & Avram, K. (2018). Gift-giving and reciprocity in global society: Introducing Marcel Mauss in international studies. *Journal of International Political Theory*, 14(2), 126–144. <https://doi.org/10.1177/1755088218757807>
- Hines, M. B., Kersulov, M. L., Holloway, C., & Rupert, R. (2016). “I’m white trying to play a black dude”: The construction of race, identities, and emotions in actual and virtual spaces. In S. Y. Tettegah & M. P. McCreery (Eds.), *Emotions, Technology, and Learning* (pp. 199–222). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800649-8.00012-2>
- Hoskins, B., & Deakin-Crick, R. (2010). Competences for learning to learn and active citizenship: different currencies or two sides of the same coin? *European Journal of Education*, 45(1), Part II.
- Hyden, G. (1997). Civil society, social capital, and development: Dissection of a complex discourse. *Studies in Comparative International Development*, 32(1), 3–30. <https://doi.org/10.1007/BF02696304>
- Kurzban, R., Burton-Chellew, M. N., & West, S. A. (2015). The evolution of altruism in humans. *Annual Review of Psychology*, 66(1), 575–599. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010814-015355>
- Lamont, C. (1997). *The philosophy of humanism* (8th ed.). Half-Moon Foundation, Inc.
- Latief, H. (2013a). Agama dan pelayanan sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Religi*, IX(2), 174–189.
- Latief, H. (2013b). *Politik filantropi di Indonesia*. Ombak.

- Marshall, T. H. (1970). *Class, citizenship and social development*. University of Chicago.
- Mauss, M. (2002). *The gift: The form and reason for exchange in archaic societies*. Taylor & Francis e-Library.
- Muqsih, M. A., Pratomo, R. R., Kuswanti, A., & Muzykant, V. L. (2021). Social solidarity movement to prevent the spread of COVID-19 pandemic in Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(3), 147–158. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V34I22021.147-158>
- Naletova, I. V., Okatov, A. V., & Zhulikova, O. V. (2016). Classical concepts of social solidarity as the basis of theoretical studies on the institutions of modern civil society. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(18), 11529–11540.
- Netz, S., Lempp, S., Krause, K., & Schramm, K. (2019). Claiming citizenship rights through the body multiple. *Citizenship Studies*, 23(7), 637–651. <https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1651041>
- Ophir, A. (2005). *The order of evils: Toward an ontology of morals*. MIT Press.
- Payne, G. T., Moore, C. B., Griffis, S. E., & Autry, C. W. (2011). Multilevel challenges and opportunities in social capital research. *Journal of Management*, 37(2), 491–520. <https://doi.org/10.1177/0149206310372413>
- Piliavin, J. A., & Charng, H. (1990). Altruism: A review of recent. *Annual Review of Sociology*, 16, 27–65. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.000331>
- Porty, A. O., & Schmidt, J. (Eds.). (2009). *Kant's. Ideal for a universal history with a cosmopolitan aim. A critical guide*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1995a). Bowling alone: Americas's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
- Putnam, R. D. (1995b). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. *PS: Political Science & Politics*, 28(4), 664–683.
- Putnam, R. D. (2001). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Sanderson, C. A. (2010). *Social psychology*. John Wiley & Sons, Inc.
- Seglow, J. (2002). Altruism and freedom. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 5(4), 145–163. <https://doi.org/10.1080/13698230410001702782>
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, aplikasi dan pemecahannya*. Kencana.
- Soewardi, H. (2001). *Roda berputar dunia bergulir, kognisi baru tentang timbul tenggelamnya sivilisasi*. Bakti Mandiri.
- Suseno, Y. (2018). Disruptive innovation and the creation of social capital in Indonesia's urban communities. *Asia Pacific Business Review*, 24(2), 174–195. <https://doi.org/10.1080/13602381.2018.1431251>
- Theodossopoulos, D. (2016). Philanthropy or solidarity? Ethical dilemmas about humanitarianism in crisis-afflicted Greece. *Social Anthropology*, 24(2), 167–184. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.12304>
- Ticktin, M. (2014). Transnational humanitarianism. *Annual Review of Anthropology*, 43(1), 273–289. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102313-030403>
- Veer, R. van der. (2007). *Lev Vygotsky*. Continuum International Publishing Group.
- Veldhuis, R. (1997). *Education for democratic citizenship: Dimensions of citizenship, core competences, variables and international activities*.

- Veugelers, W. (2011). Introduction: Linking autonomy and humanity. In W. Veugelers (Ed.), *Education and humanism. Linking autonomy and humanity* (pp. 1–8). Sense Publishers.
- Vygotsky, L. S. (1997). *Educational psychology* (R. Silverman, Trans.; Published). CRC Press LLC.